



SALINAN

GUBERNUR JAWA TENGAH
KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR 100.3.3.1/360 TAHUN 2025
TENTANG

PERUBAHAN KEENAM ATAS KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH NOMOR
100.3.3.1/1 TAHUN 2025 TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA
KEUANGAN PADA PERANGKAT DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH
TAHUN ANGGARAN 2025

GUBERNUR JAWA TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa guna ketertiban dan kelancaran penatausahaan pengelolaan keuangan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2025, telah ditetapkan Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 100.3.3.1/1 Tahun 2025 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Keuangan Pada Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2025 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 100.3.3.1/273 Tahun 2025 tentang Perubahan Kelima Atas Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 100.3.3.1/1 Tahun 2025 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Keuangan Pada Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2025;
- b. bahwa sehubungan dengan adanya penunjukan pejabat pelaksana tugas pada Inspektur Provinsi Jawa Tengah dan Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Provinsi Jawa Tengah, mutasi pegawai pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Tengah dan pengajuan cuti melahirkan pada Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah maka Keputusan Gubernur sebagaimana dimaksud pada huruf a sudah tidak sesuai lagi sehingga perlu diubah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Perubahan Keenam Atas Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 100.3.3.1/1 Tahun 2025 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Keuangan Pada Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang

- Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan Dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 6. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 12 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 Nomor 12);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 799);
 9. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 38 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 Nomor 39);
 10. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 39 Tahun 2024 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 Nomor 40);
 11. Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 100.3.3.1/1 Tahun 2025 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Keuangan Pada Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2025 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan

Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 100.3.3.1/273 Tahun 2025 tentang Perubahan Kelima Atas Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 100.3.3.1/1 Tahun 2025 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Keuangan Pada Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2025;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Mengubah ketentuan huruf G, V, CC Dan HH Lampiran Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 100.3.3.1/1 Tahun 2025 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Keuangan Pada Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2025 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 100.3.3.1/273 Tahun 2025 tentang Perubahan Kelima Atas Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 100.3.3.1/1 Tahun 2025 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Keuangan Pada Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2025, menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku sejak tanggal pengusulan oleh Perangkat Daerah/Unit Kerja pada Perangkat Daerah.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 3 September 2025

GUBERNUR JAWA TENGAH,

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum ,

ttd



AHMAD LUTHFI

Haerudin, S.H., M.H.
Pembina Utama Muda
NIP. 197007291996031001

SALINAN : Keputusan Gubernur ini disampaikan kepada Yth.:

1. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah;
2. Wakil Gubernur Jawa Tengah;
3. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
4. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
5. Asisten Administrasi Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
6. Kepala Perwakilan Badan Pemeriksa Keuangan Provinsi Jawa Tengah;
7. Inspektur Provinsi Jawa Tengah;
8. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Tengah;
9. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah;
10. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah;
11. Pejabat Pengelola Keuangan pada Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2025.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR 100.3.3.1/360 TAHUN 2025
TENTANG
PERUBAHAN KEENAM ATAS KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH NOMOR 100.3.3.1/1 TAHUN 2025 TENTANG
PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN PADA PERANGKAT DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN
ANGGARAN 2025

PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN PADA PERANGKAT DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN ANGGARAN 2025

G. DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

NO	NAMA/NIP/JABATAN	KEDUDUKAN	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN
1	2	3	4
1	<div>aAHMAD AZIZ, SE, M.Si NIP. 19680617 199803 1 007 Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah</div> <div>bTITIK INDRIANI, SE NIP. 19770606 199003 2 004 Bendahara</div> <div>cMARIA WIDYA NATALI, A.Md NIP. 19860731 201001 2 022 Pengolah Data Anggaran dan Perbendaharaan</div>	<div>Pejabat Pengguna Anggaran/ Pengguna Barang Pejabat yang Berwenang Mengesahkan Surat Pertanggungjawaban</div> <div>Bendahara Pengeluaran</div> <div>Bendahara Penerimaan</div>	<div>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI Administrasi Umum Perangkat Daerah<div>1 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor</div><div>2 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor</div><div>3 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga</div><div>4 Penyediaan Bahan Logistik Kantor</div><div>5 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan</div><div>6 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan</div><div>7 Fasilitasi Kunjungan Tamu</div><div>8 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</div><div>9 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD</div></div> <div>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah<div>1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN</div><div>2 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN</div><div>3 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD</div><div>4 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD</div></div> <div>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah<div>1 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD</div></div> <div>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah<div>1 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai</div><div>2 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi</div><div>3 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan</div></div>

NO	NAMA/NIP/JABATAN	KEDUDUKAN	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN
			<div>4 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan</div> <div>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</div> <div><div>1 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya</div><div>2 Pengadaan Aset Tak Berwujud</div></div> <div>Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah</div> <div><div>1 Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah</div></div> <div>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</div> <div><div>1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat</div><div>2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik</div><div>3 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor</div><div>4 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor</div></div> <div>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</div> <div><div>1 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan</div><div>2 Pemeliharaan Mebel</div><div>3 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya</div><div>4 Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya</div><div>5 Pemeliharaan Aset Tak Berwujud</div><div>6 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya</div><div>7 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya</div><div>8 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya</div></div> <div>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</div> <div><div>1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah</div><div>2 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</div></div> <div>PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA</div> <div>Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)</div> <div><div>1 Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro</div><div>2 Fasilitasi Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro</div><div>3 Fasilitasi Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Mikro</div></div>
2	<div>a CANDRA YULIAWAN, AP, M.Si</div> <div>NIP. 19750728 199311 1 001</div> <div>Kabid Penempatan Tenaga Kerja dan Transmigrasi</div>	<div>Kuasa Pengguna Anggaran/</div> <div>Kuasa Pengguna Barang</div>	<div>PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA</div> <div>Pengesahan RPTKA Perpanjangan yang tidak Mengandung Perubahan Jabatan, Jumlah TKA, dan Lokasi Kerja dalam 1 (satu) Daerah Provinsi</div> <div><div>1 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengesahan RPTKA yang tidak Mengandung Perubahan Jabatan, Jumlah TKA, dan Lokasi Kerja dalam 1 (satu) Daerah Provinsi</div></div> <div>Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Provinsi</div>

NO	NAMA/NIP/JABATAN	KEDUDUKAN	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN
	b HILDHA HIDAYAH, S.STP NIP. 19960806 201708 2 001 Pengolah Data Anggaran dan Perbendaharaan	Bendahara Pengeluaran Pembantu	1 Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI) 2 Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Cabang Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (PMI) terintegrasi secara elektronik 3 Penyediaan Layanan Terpadu pada Calon Pekerja Migran 4 Pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia Purna Penempatan
	c RISWANTO ADI NUGROHO, SE NIP. 19810110 202321 1 006 Pengantar Kerja Ahli Pertama	Bendahara Penerima Pembantu	Pengelolaan Informasi Pasar Kerja 1 Pemeliharaan dan Operasional Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online 2 Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online 3 Job Fair /Bursa Kerja Pelayanan antar Kerja Lintas Daerah Kabupaten/Kota 1 Penyediaan Sumber Daya Pelayanan Antar Kerja 2 Pelayanan Antar Kerja 3 Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja 4 Pembinaan Operasionalisasi Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja AKAD (Antar Kerja Antar Daerah) dan AKL (Antar Kerja Lokal) 5 Perluasan Kesempatan Kerja 6 Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan Penerbitan Izin Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) lebih dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota 1 Pengawasan dan Pengendalian LPTKS PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi 1 Koordinasi dan Sinkronisasi Kerjasama Pembangunan Transmigrasi antar Pemerintah Daerah Kabupaten/kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi
3	a MASDUQI, SE, M.Si NIP. 19680421 199503 1 005 Kepala Bidang Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	Kuasa Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna Barang	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA Pelaksanaan Akreditasi Lembaga Pelatihan Kerja 1 Survey dan Penilaian Akreditasi Kepada Lembaga Pelatihan Kerja Pelaksanaan Latihan Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi
	b RATMINAH, SE NIP. 19700129 200701 2 006	Bendahara Pengeluaran Pembantu	1 Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi 2 Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama Dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja
	Pengolah Data Anggaran dan Perbendaharaan		Konsultansi Produktivitas pada Perusahaan Menengah 1 Pelaksanaan Konsultasi Produktivitas kepada Perusahaan Menengah

NO	NAMA/NIP/JABATAN	KEDUDUKAN	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN
4	<div>aAHMAD AZIZ, SE, M.Si</div> <div>NIP. 19680617 199803 1 007</div> <div>Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah</div> <div>bLINA YUNianti, SE, Akt</div> <div>NIP. 19750612 201001 2 014</div> <div>Bendahara</div>	<div>Kuasa Pengguna Anggaran/</div> <div>Kuasa Pengguna Barang</div> <div>Bendahara Pengeluaran Pembantu</div>	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP), Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP), Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK), dan Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK) <div><div>1Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP)</div><div>2Penetapan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK)</div><div>3Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja</div></div> Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk yang Mempunyai Wilayah Kerja lebih dari 1 (satu) Kabupaten/Kota <div><div>1Pengesahan Peraturan Perusahaan yang terkait dengan Hubungan Industrial</div><div>2Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama yang terkait dengan Hubungan Industrial</div><div>3Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja</div></div> Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Provinsi <div><div>1Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Provinsi</div><div>2Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh serta Non Afiliasi</div><div>3Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerjasama Tripartit Daerah Provinsi</div><div>4Pembinaan Pengupahan Skala Provinsi</div></div>
5	<div>aMOH WACHJU ALAMSYAH, SH</div> <div>NIP. 19680505 199703 1 007</div> <div>Kepala Bidang Pengawasan</div> <div>bHILDHA HIDAYAH, S.STP</div> <div>NIP. 19960806 201708 2 001</div> <div>Pengolah Data Anggaran dan Perbendaharaan</div>	<div>Kuasa Pengguna Anggaran/</div> <div>Kuasa Pengguna Barang</div> <div>Bendahara Pengeluaran Pembantu</div>	PROGRAM PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN Penyelenggaraan Pengawasan Ketenagakerjaan <div><div>1Penegakan Hukum Ketenagakerjaan di Perusahaan</div><div>2Pelayanan Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Perusahaan</div><div>3Pengawasan Pelaksanaan Norma Kerja di Perusahaan</div></div>
6	<div>aEKO MULYADI, S.Pd, MM</div> <div>NIP. 19690531 199710 1 001</div> <div>Kepala Balai latihan Kerja Cilacap</div> <div>bCUT MUTIARA YOESHINTA ASP,S.Pt</div> <div>NIP. 19940801 202012 2 015</div>	<div>Kuasa Pengguna Anggaran/</div> <div>Kuasa Pengguna Barang</div> <div>Bendahara Pengeluaran Pembantu</div>	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI Administrasi Umum Perangkat Daerah <div><div>1Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor</div><div>2Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor</div><div>3Penyediaan Peralatan Rumah Tangga</div><div>4Penyediaan Bahan Logistik Kantor</div></div>

NO	NAMA/NIP/JABATAN	KEDUDUKAN	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN
	<p>Analisis Kompetensi dan Kualifikasi Tenaga Kerja</p> <p>c PUTRI PERMATAWIDYA, SE NIP. 19860826 201001 2 016 Pengelola Sarana Prasarana Rumah Tangga Dinas</p>	Bendahara Penerimaan Pembantu	<p>5 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan</p> <p>6 Penyediaan Bahan/Material</p> <p>7 Fasilitas Kunjungan Tamu</p> <p>8 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</p> <p>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</p> <p>1 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN</p> <p>Penyedia Jasa dan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</p> <p>1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat</p> <p>2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik</p> <p>3 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor</p> <p>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerinytah Daerah</p> <p>1 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan</p> <p>2 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya</p> <p>3 Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya</p> <p>4 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya</p> <p>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</p> <p>1 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya</p> <p>PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA</p> <p>Pelaksanaan Latihan Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi</p> <p>1 Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi</p> <p>2 Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama Dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja</p> <p>3 Pengadaan Sarana Pelatihan Kerja</p>
7	<p>a Ir. ASIH SUCIATI, MP NIP. 19680727 199503 2 005 Kepala Balai Pelatihan Kerja dan Transmigrasi</p> <p>b PRISMA NURUL ILMIYATI, SP NIP. 19960820 202012 2 017 Penyuluh Transmigrasi</p>	<p>Kuasa Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna Barang</p> <p>Bendahara Pengeluaran Pembantu</p>	<p>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</p> <p>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</p> <p>1 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN</p> <p>Administrasi Umum Perangkat Daerah</p> <p>1 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor</p> <p>2 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor</p>

NO	NAMA/NIP/JABATAN	KEDUDUKAN	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN
	c KARSUM NIP. 19760108 200604 1 013 Pengadministrasi Umum	Bendahara Penerimaan Pembantu	<div>3 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga</div> <div>4 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan</div> <div>5 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan</div> <div>6 Fasilitas Kunjungan Tamu</div> <div>7 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</div> <div>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</div> <div>1 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya</div> <div>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</div> <div>1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat</div> <div>2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik</div> <div>3 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor</div> <div>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerinytah Daerah</div> <div>1 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan</div> <div>2 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya</div> <div>3 Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya</div> <div>4 Pemeliharaan Aset Tak Berwujud</div> <div>5 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya</div> <div>6 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya</div> <div>PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA</div> <div>Pelaksanaan Latihan Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi</div> <div>1 Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi</div> <div>2 Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama Dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja</div> <div>3 Pengadaan Sarana Pelatihan Kerja</div> <div>PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI</div> <div>Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi</div> <div>1 Pelatihan Transmigrasi</div>
8	a SITI ZUBAEDAH ATAUCHIDIJAH, S.Sos NIP. 19710617 199603 2 002 Kepala Balai Latihan Kerja Semarang 1 b PRISCILLA ANDALIA DYAN UTAMININGSIH, S.KM NIP. 19860520 202012 2 008 Penyuluh Tenaga Kerja	Kuasa Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna Barang Bendahara Pengeluaran Pembantu	<div>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</div> <div>Administarsi Umum Perangkat Daerah</div> <div>1 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor</div> <div>2 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga</div> <div>3 Penyediaan Bahan Logistik Kantor</div> <div>4 Penyediaan Bahan/Material</div> <div>Administarsi Keuangan Perangkat Daerah</div>

NO	NAMA/NIP/JABATAN	KEDUDUKAN	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN
	c RUDI WIDO ATMOJO, Amd. Kom NIP. 19990828 202421 1 001 Pranata Komputer Terampil	Bendahara Penerimaan Pembantu	<div>1 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN</div> <div>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</div> <div>1 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik</div> <div>2 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor</div> <div>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</div> <div>1 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan</div> <div>PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA</div> <div>Pelaksanaan Latihan Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi</div> <div>1 Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi</div> <div>2 Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama Dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja</div> <div>3 Pengadaan Sarana Pelatihan Kerja</div>
9	a A.AMRIH WIDHI CAKSONO, S.IP NIP. 19770324 201001 1 006 Kepala Balai Latihan Kerja Semarang 2	Kuasa Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna Barang	<div>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</div> <div>Administarsi Umum Perangkat Daerah</div> <div>1 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor</div> <div>2 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga</div> <div>3 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan</div> <div>4 Penyediaan Bahan/Material</div> <div>5 Fasilitas Kunjungan Tamu</div> <div>6 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</div> <div>Administarsi Keuangan Perangkat Daerah</div> <div>1 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN</div> <div>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</div> <div>1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat</div> <div>2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik</div>
	b SUTARDI NIP. 19750806 200701 1 011 Pengadministrasi Keuangan	Bendahara Pengeluaran Pembantu	
	c NURHAYATI, S.E. NIP. 19811229 202321 2 013 Instruktur Ahli Pertama	Bendahara Penerimaan Pembantu	<div>3 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor</div> <div>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</div> <div>1 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya</div> <div>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerinytah Daerah</div> <div>1 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan</div> <div>2 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya</div> <div>3 Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya</div>

NO	NAMA/NIP/JABATAN	KEDUDUKAN	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN
			PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Provinsi 1 Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja Konsultansi Produktivitas pada Perusahaan Menengah 1 Pelaksanaan Konsultasi Produktivitas kepada Perusahaan Menengah Pelaksanaan Latihan Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi 1 Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi 2 Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama Dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja 3 Pengadaan Sarana Pelatihan Kerja
10	a HADI PRABOWO, SIP NIP. 19701023 199803 1 004 Kepala Balai Keselamatan Kerja b SATRITNA SARAH SAHARA NI'MAH, S.Tr. Kes NIP. 19960304 202321 2 029 Penguji K3 Ahli Pertama c HARTOJO NIP. 19741129 201001 1 003 Pengadministrasi Keuangan	Kuasa Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna Barang Bendahara Penerimaan Pembantu Bendahara Pengeluaran Pembantu	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI Administrasi Umum Perangkat Daerah 1 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 2 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 3 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 4 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 5 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan 6 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 1 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 2 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 1 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 3 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 1 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 1 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 2 Pemeliharaan Aset Tak Berwujud

V. DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

NO	NAMA/NIP/JABATAN	KEDUDUKAN	PROGRAM / KEGIATAN /SUB KEGIATAN
1	2	3	4
1	<p>a JULY EMMYLIA, SE, MM NIP. 19720713 199703 2 005 Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan</p> <p>b YUDHA ADHI NUGROHO, S.STP NIP. 199407032016091002 Verifikator Keuangan</p> <p>c ALVAREZA YOGI PRATAMA, A.Md.Ak. NIP. 19981019 202201 1 001 Bendahara</p>	<p>Pengguna Anggaran/ Pengguna Barang/ Pemegang KKPD</p> <p>Bendahara Penerimaan</p> <p>Bendahara Pengeluaran/ Administrator KKPD</p>	<p>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 2 Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah <p>Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 2 Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 3 Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD <p>Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 Sub Kegiatan Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD 2 Sub Kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD <p>Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 Sub Kegiatan Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai 2 Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi 3 Sub Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan <p>Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 2 Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 3 Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 4 Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor 5 Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan 6 Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 7 Sub Kegiatan Fasilitas Kunjungan Tamu

NO	NAMA/NIP/JABATAN	KEDUDUKAN	PROGRAM / KEGIATAN /SUB KEGIATAN
1	2	3	4
			8 Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 9 Sub Kegiatan Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD 10 Sub Kegiatan Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 1 Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 2 Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 1 Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 2 Sub Kegiatan Pemeliharaan Mebel 3 Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 4 Sub Kegiatan Pemeliharaan Aset Tak Berwujud 5 Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 6 Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
2	a SRI SUPADMI RAHAYU, SP. MM. NIP. 19690501 199803 2 003 Kepala Balai Pengujian dan Sertifikasi Dan Mutu Barang Surakarta b SRI WAHYUNI, SP. M.Si. NIP. 19690806 199203 2 007 Pengelola Sumber Pendapatan Asli Daerah c DEVI DARYATMO, SE. NIP. 19751026 200901 1 004 Pengelola Kegiatan dan Anggaran	Kuasa Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Barang Bendahara Penerimaan Pembantu Bendahara Pengeluaran Pembantu	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 1 Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 1 Sub Kegiatan Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah 1 Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 2 Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 3 Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 4 Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor 5 Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan 6 Sub Kegiatan Fasilitas Kunjungan Tamu 7 Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 1 Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 2 Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

NO	NAMA/NIP/JABATAN	KEDUDUKAN	PROGRAM / KEGIATAN /SUB KEGIATAN
1	2	3	4
			<p>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 2 Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 3 Sub Kegiatan Pemeliharaan Mebel 4 Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 5 Sub Kegiatan Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya 6 Sub Kegiatan Pemeliharaan Aset Tak Berwujud 7 Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 8 Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 9 Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya <p>PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN Kegiatan Pelaksanaan Pengujian dan Sertifikasi Mutu Produk di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 Sub Kegiatan Pengembangan Layanan Kalibrasi 2 Sub Kegiatan Pengembangan Layanan Pengujian 3 Sub Kegiatan Pengembangan Layanan Sertifikasi/Lembaga Inspeksi
3	<p>a JULY EMMYLIA, SE, MM NIP. 19720713 199703 2 005 Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan</p> <p>b JOKO MARIYONO NIP. 19700315 199203 1 006 Pengadministrasi Umum</p> <p>c ADITYA WINANDA, ST. NIP. 19840407 201502 2 001 Pengelola Mutu Barang Ahli Pertama</p>	<p>Kuasa Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Barang</p> <p>Bendahara Penerimaan Pembantu</p> <p>Bendahara Pengeluaran Pembantu</p>	<p>PROGRAM PENUNJANGURUSAN PEMERINTAHAN DAERAH Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN <p>Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 Sub Kegiatan Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD <p>Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 2 Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 3 Sub Kegiatan Penyediaan peralatan Rumah Tangga 4 Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor 5 Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 6 Sub Kegiatan Fasilitas Kunjungan Tamu 7 Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD <p>Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 2 Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

NO	NAMA/NIP/JABATAN	KEDUDUKAN	PROGRAM / KEGIATAN /SUB KEGIATAN
1	2	3	4
			<p>Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 2 Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 3 Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 4 Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya <p>PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN</p> <p>Kegiatan Pelaksanaan Pengujian dan Sertifikasi Mutu Produk di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 Sub Kegiatan Pengembangan Layanan Pengujian 2 Sub Kegiatan Pengembangan Layanan Kalibrasi
4	<p>a SRI PURWANTI, SE,MM. NIP. 19680318 199603 2 002 Kepala Balai Industri Produk Tekstil dan Alaskaki</p> <p>b DIANA ARSIANTI NIP. 19770624 200901 2 004 Pengadministrasi Umum</p> <p>c INTAN YULIA DITASARI, SE. NIP. 19840726 201001 2 002 Pengelola Pendapatan Asli Daerah</p>	<p>Kuasa Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Barang</p> <p>Bendahara Penerimaan Pembantu</p> <p>Bendahara Pengeluaran Pembantu</p>	<p>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH</p> <p>Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN <p>Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 Sub Kegiatan Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD <p>Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 2 Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 3 Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor 4 Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan 5 Sub Kegiatan Fasilitas Kunjungan Tamu 6 Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD <p>Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 3 Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor <p>Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Lainnya Lapangan 2 Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 3 Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 4 Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

NO	NAMA/NIP/JABATAN	KEDUDUKAN	PROGRAM / KEGIATAN /SUB KEGIATAN
1	2	3	4
			PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI Kegiatan Penyusunan, Penerapan dan Evaluasi Rencana pembangunan Industri Provinsi 1 Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Sumber Daya Industri
5	a IDA BAGUS KETUT ALAMSYAH, S.Sos, M.Si. NIP. 19730915 199211 1 001 Kepala Balai Industri Kreatif Digital dan Kemasan b MIRZA ELMALA CHATRA, S.Kom. NIP. 199701202022032011 Perancang Grafis c ANA PURNAMI, SE NIP. 19720902 199403 2 002 Pengolah Data Anggaran dan Perbendaharaan	Kuasa Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Barang Bendahara Penerimaan Pembantu Bendahara Pengeluaran Pembantu	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 1 Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 1 Sub Kegiatan Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah 1 Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 2 Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 3 Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 4 Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor 5 Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan 6 Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 7 Sub Kegiatan Fasilitas Kunjungan Tamu 8 Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 1 Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 2 Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 3 Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 1 Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 2 Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 3 Sub Kegiatan Pemeliharaan Mebel 4 Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 5 Sub Kegiatan Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya 6 Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 7 Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 8 Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

NO	NAMA/NIP/JABATAN	KEDUDUKAN	PROGRAM / KEGIATAN /SUB KEGIATAN
1	2	3	4
			PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI Kegiatan Penyusunan, Penerapan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi 1 Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri 2 Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta masyarakat
6	a HUSNI, SE. M.Pi. NIP. 19710501 199803 1 012 Kepala Balai Industri Logam dan Kayu b DIDIK SOEPRIJANTO NIP. 19720422 201001 1 002 Pengadministrasi Umum c NOVITA ADHITYA MALIK A.Md.KOM. NIP. 19981104 202012 2 002 Pengolah Data Anggaran dan Perbendaharaan	Kuasa Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Barang Bendahara Penerimaan Pembantu Bendahara Pengeluaran Pembantu	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 1 Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 1 Sub Kegiatan Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah 1 Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 2 Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 3 Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 4 Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor 5 Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan 6 Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 7 Sub Kegiatan Fasilitas Kunjungan Tamu 8 Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 1 Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 2 Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 3 Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 1 Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 2 Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 3 Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 4 Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 5 Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI Kegiatan Penyusunan, Penerapan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi 1 Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri

NO	NAMA/NIP/JABATAN	KEDUDUKAN	PROGRAM / KEGIATAN /SUB KEGIATAN
1	2	3	4
7	<p>a SUCAHYO, SH. MM. NIP. 19671005 198903 1 009 Kepala Bidang Perdagangan Dalam Negeri</p> <p>b INDAH MARGANISARI, SE. Akt. NIP. 19791012 200903 2 005 Pengolah Data Anggaran dan Perbendaharaan</p>	<p>Kuasa Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Barang</p> <p>Bendahara Pengeluaran Pembantu</p>	<p>PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN Kegiatan Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Toko Bebas Bea dan Rekomendasi Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol (SIUP-MB) bagi Distributor</p> <p>1 Sub Kegiatan Fasilitasi Pemenuhan Komitmen SIUP-MB Toko Bebas Bea dan Rekomendasi SIUP-MB Bagi Distributor melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik</p> <p>PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN Kegiatan Pembangunan dan Pengelolaan Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi serta Pasar Lelang Komoditas</p> <p>1 Sub Kegiatan Pembinaan dan Pengendalian Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi</p> <p>PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING Kegiatan Pengendalian Harga, Informasi Ketersediaan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan</p> <p>1 Sub Kegiatan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota</p> <p>2 Sub Kegiatan Operasi Pasar dalam rangka Stabilisasi Harga Pangan Pokok yang Dampaknya Beberapa Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi</p> <p>Kegiatan Pengawasan Pupuk dan Pestisida Tingkat Daerah Provinsi dalam Melakukan Pelaksanaan Pengadaan, Penyaluran dan Penggunaan Pupuk Bersubsidi di Wilayah Kerjanya</p> <p>1 Sub Kegiatan Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk Bersubsidi</p> <p>Kegiatan Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting diTingkat Daerah Provinsi</p> <p>1 Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok di Tingkat Distributor dan Sub Distributor</p> <p>PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI Kegiatan Pelaksanaan Promosi Produk Dalam Negeri</p> <p>1 Sub Kegiatan Fasilitasi Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Provinsi</p> <p>Kegiatan Pelaksanaan Pemasaran Penggunaan Produk Dalam Negeri</p> <p>1 Sub Kegiatan Fasilitasi Pemasaran Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Provinsi</p> <p>Kegiatan Pelaksanaan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri</p> <p>1 Sub Kegiatan Fasilitasi Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Provinsi</p>

NO	NAMA/NIP/JABATAN	KEDUDUKAN	PROGRAM / KEGIATAN /SUB KEGIATAN
1	2	3	4
8	<p>a JULY EMMYLIA, SE, MM NIP. 19720713 199703 2 005 Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan</p> <p>b ENNY YULIANTI, SH. NIP. 19690709 200801 2 013 Pengolah Data Anggaran dan Perbendaharaan</p>	<p>Kuasa Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Barang</p> <p>Bendahara Pengeluaran Pembantu</p>	<p>PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN Kegiatan Penerbitan Surat Keterangan Asal (SKA) Bagi Daerah Provinsi yang Telah Ditetapkan Sebagai Instansi Penerbit SKA dan Angka Pengenal Importir (API) 1 Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Layanan Penerbitan SKA</p> <p>PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR Kegiatan Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam Provinsi 1 Sub Kegiatan Pameran Dagang Internasional/Nasional 2 Sub Kegiatan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan 3 Sub Kegiatan Peningkatan Citra Produk Ekspor 4 Sub Kegiatan Pameran Dagang Lokal</p>
9	<p>a DEVITA AYU MIRANDATI, SE. M.Si. NIP. 19701217 199003 2 002 Kepala Bidang Standarisasi dan Perlindungan Konsumen</p> <p>b SYAMSUDIN, SE NIP. 19670712 198903 1 009 Analisis Laporan Keuangan</p>	<p>Kuasa Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Barang</p> <p>Bendahara Pengeluaran Pembantu</p>	<p>PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN Kegiatan Pelaksanaan Perlindungan Konsumen di Seluruh Daerah Kabupaten / Kota 1 Sub Kegiatan Pemberdayaan Konsumen dan Kelembagaan Perlindungan Konsumen 2 Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan dan Penyelesaian Sengketa Konsumen</p> <p>Kegiatan Pelaksanaan Pengujian dan Sertifikasi Mutu Produk di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota 1 Pengembangan Layanan Sertifikasi / Lembaga Inspeksi</p> <p>Kegiatan Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota 1 Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas dan Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar dan /atau Jasa serta kegiatan perdagangan sesuai parameter ketentuan perlindungan konsumen dan tertib niaga</p> <p>PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG Kegiatan Pengawasan Pupuk dan Pestisida Tingkat Daerah Provinsi dalam Melakukan Pelaksanaan Pengadaan, Penyaluran dan Penggunaan Pupuk Bersubsidi di Wilayah Kerjanya 1 Sub Kegiatan Pemeriksaan Dokumen Persyaratan Perizinan Distribusi Pupuk Bersubsidi</p> <p>PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN Kegiatan Pengendalian Usaha Perdagangan Bahan Berbahaya Pengecer Terdaftar 1 Sub Kegiatan Pengawasan, Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Barang Berbahaya</p>
10	<p>a ESTI WULANDARI, SE. MM. NIP. 19690722 198903 2 001 Kepala Bidang Industri Non Agro</p>	<p>Kuasa Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Barang</p>	<p>PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI Kegiatan Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi 1 Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri 2 Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri</p>

NO	NAMA/NIP/JABATAN	KEDUDUKAN	PROGRAM / KEGIATAN /SUB KEGIATAN
1	2	3	4
	b MARIA IKA YULIANI NIP. 19800101 200901 2 009 Pengolah Data Anggaran dan Perbendaharaan	Bendahara Pengeluaran Pembantu	3 Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL Kegiatan Penyediaan Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI, dan IPKI Kewenangan Provinsi Berbasis Sistem Informasi Industri Nasional Nasional (SIINAS) 1 Sub Kegiatan Diseminasi Publikasi Data Informasi serta Analisa Industri Provinsi melalui SIINas 2 Sub Kegiatan Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Provinsi dalam Penyampaian Data ke SIINas PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI) Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Provinsi 1 Sub Kegiatan Fasilitas verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang terintegrasi dengan Sistem Online Single Submission Risk Base Approach (OSS RBA)
11	a IKHWAN JOKO ISTARTO, SP. M,Si. NIP. 19750425 200604 1 003 Kepala Bidang Industri Agro b ALVAREZA YOGI PRATAMA, A.Md.Ak NIP. 19981019 202201 1 001 Verifikator Keuangan	Kuasa Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Barang Bendahara Pengeluaran Pembantu	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI Kegiatan Penyusunan, Penerapan dan Evaluasi Rencana pembangunan Industri Provinsi 1 Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri 2 Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri 3 Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI Kegiatan Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Provinsi 1 Sub Kegiatan Fasilitas verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang terintegrasi dengan Sistem Online Single Submission Risk Base Approach (OSS RBA) PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL Kegiatan Penyediaan Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Provinsi Berbasis Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) 1 Sub Kegiatan Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Provinsi dalam Penyampaian Data ke SIINas

CC. BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

NO	NAMA/NIP/JABATAN	KEDUDUKAN	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN
1	2	3	4
1.	<p>a. PRADHANA AGUNG NUGRAHA, S.STP, MM</p> <p>NIP. 19820331 200012 1 001</p> <p>Plt. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik</p> <p>Provinsi Jawa Tengah</p> <p>b. JOKO WIYANTO, A.Md</p> <p>NIP. 19920824 202012 1 016</p> <p>Staf</p>	<p>Pengguna Anggaran /</p> <p>Pengguna Barang /</p> <p>Pemegang KKPD</p> <p>Bendahara Pengeluaran /</p> <p>Administrator KKPD</p>	<p>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</p> <p>Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</p> <p>1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah</p> <p>2 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</p> <p>Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</p> <p>1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN</p> <p>2 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN</p> <p>3 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD</p> <p>4 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD</p> <p>5 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD</p> <p>Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah</p> <p>1 Pengamanan Barang Milik Daerah</p> <p>Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</p> <p>1 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya</p> <p>2 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian</p> <p>3 Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai</p> <p>4 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi</p> <p>5 Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan</p> <p>Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah</p> <p>1 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor</p> <p>2 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor</p> <p>3 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga</p> <p>4 Penyediaan Bahan Logistik Kantor</p> <p>5 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan</p> <p>6 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan</p> <p>7 Fasilitas Kunjungan Tamu</p> <p>8 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</p> <p>9 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD</p> <p>10 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD</p> <p>Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</p> <p>1 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan</p> <p>2 Pengadaan Mebel</p> <p>3 Pengadaan Peralatan Mesin Lainnya</p> <p>4 Pengadaan Sarana Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya</p> <p>Kegiatan Penyediaan Jasa Urusan Penunjang Pemerintahan Daerah</p> <p>1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat</p> <p>2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik</p> <p>3 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor</p>

NO	NAMA/NIP/JABATAN	KEDUDUKAN	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN
1	2	3	4
			Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 1 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 2 Pemeliharaan Mebel 3 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 4 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 5 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
2	a. PRADHANA AGUNG NUGRAHA, S.STP, MM NIP. 19820331 200012 1 001 Kepala Bidang Ideologi dan Kewaspadaan b. HERRA PUSPITA, S.Sos NIP. 19690307 198911 2 005 Staf	Kuasa Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Barang Bendahara Pengeluaran Pembantu	Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan 1 Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika, dan Sejarah Kebangsaan 2 Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika, dan Sejarah Kebangsaan 3 Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika, dan Sejarah Kebangsaan 4 Pengangkatan Purnapaskibraka Duta Pancasila 5 Pembinaan terhadap aktivitas kepaskibrakaan dan Purnapaskibraka 6 Pelaksanaan tugas Paskibraka 7 Pembentukan Paskibraka Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial 1 Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah 2 Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah 3 Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah 4 Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi

NO	NAMA/NIP/JABATAN	KEDUDUKAN	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN
1	2	3	4
3	<p>a. MUSLICHAH SETIASIH, S.IP, MMG, M.Eng NIP. 19800901 201001 2 018 Kepala Bidang Ketahanan Bangsa</p> <p>b. ANJAR TRI LAKSONO NIP. 19740922 200701 1 007 Staf</p>	<p>Kuasa Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Barang</p> <p>Bendahara Pengeluaran Pembantu</p>	<p>PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN</p> <p>Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 Pelaksanaan Kebijakan di bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah 2 Pelaksanaan Koordinasi di bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah 3 Pelaksanaan Monitoring Evaluasi Dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah <p>Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya</p> <p>Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah 2 Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah 3 Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah
4	<p>a. PRADHANA AGUNG NUGRAHA, S.STP, MM NIP. 19820331 200012 1 001 Plt. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah</p> <p>b. NURI HARYANI NIP. 19750902 199603 2 001 Staf</p>	<p>Kuasa Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Barang</p> <p>Bendahara Pengeluaran Pembantu</p>	<p>Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik</p> <p>Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis Dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah 2 Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah 3 Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah 4 Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah 5 Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah

HH. INSPEKTORAT

NO	NAMA/NIP/JABATAN	KEDUDUKAN	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN
1	2	3	4
1.	<p>a. URIP SIHABUDIN, S.H., M.H. NIP. 19661224 199103 1 005 Plt. Inspektur</p> <p>b. WORO ENDAH SEPTIARTI, SE NIP. 19800922 200903 2 003 Staf</p>	<p>Pengguna Anggaran/ Pengguna Barang / Pemegang KKPD</p> <p>Bendahara Pengeluaran / Administrator KKPD</p>	<p>Program Penyelenggaraan Pengawasan Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Internal</p> <p>1. Monitoring dan Pemeriksaan BPK Pemeriksaan APIP Evaluasi RI dan Tindak Lanjut Hasil Hasil</p> <p>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</p> <p>1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah</p> <p>2. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</p> <p>Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</p> <p>1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN</p> <p>2. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD</p> <p>Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</p> <p>1. Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD</p> <p>Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</p> <p>1. Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian</p> <p>2. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi</p> <p>Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah</p> <p>1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor</p> <p>2. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan</p> <p>3. Fasilitasi Kunjungan Tamu</p> <p>4. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</p> <p>5. Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD</p> <p>Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</p> <p>1. Pengadaan Mebel</p> <p>2. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya</p> <p>Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</p> <p>1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat</p> <p>2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik</p> <p>3. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor</p> <p>4. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor</p> <p>Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</p> <p>1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan</p> <p>2. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan</p>

NO	NAMA/NIP/JABATAN	KEDUDUKAN	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN
1	2	3	4
			3. Pemeliharaan Mebel 4. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 5. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 6. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitas Pengawasan 1. Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan Kegiatan Pendampingan dan Asistensi Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan 1. Korupsi 2. Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi
2.	a. URIP SIHABUDIN, S.H., M.H. NIP. 19661224 199103 1 005 Plt. Inspektur b. DIFTA ANDINA, SE NIP. 19940702 201902 2 005 Staf	Kuasa Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Barang Bendahara Pengeluaran Pembantu	Program Penyelenggaraan Pengawasan Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Internal 1. Reviu Laporan Kinerja 2. Pengawasan Umum dan Teknis Kabupaten/Kota
3.	a. SOEMARIJONO, SE,M.Si NIP. 196911091990031005 Inspektur Pembantu Bidang Pengawasan Akuntabilitas Keuangan Daerah b. SUTARTINI, SE NIP. 19680925 199403 2 005 Staf	Kuasa Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Barang Bendahara Pengeluaran Pembantu	Program Penyelenggaraan Pengawasan Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Internal 1. Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah 2. Reviu Laporan Keuangan

NO	NAMA/NIP/JABATAN	KEDUDUKAN	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN
1	2	3	4
4.	a. RATNA LUHUNG TJIPTANINGTYAS, SE, MM NIP. 19701026 199703 2 003 Inspektur Pembantu Bidang Pengawasan Kinerja Perangkat Daerah b. SHOLIHIN NIP. 19741103 200801 1 006 Staf	Kuasa Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Barang Bendahara Pengeluaran Pembantu	Program Penyelenggaraan Pengawasan Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Internal 1. Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah
5.	a. ANTONIUS DWIJO P., SE, Akt, M.Si NIP. 19800729 200604 1 011 Inspektur Pembantu Bidang Pengawasan Khusus b. SUYATMININGSIH, SE NIP. 19680218 199003 2 003 Staf	Kuasa Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Barang Bendahara Pengeluaran Pembantu	Program Penyelenggaraan Pengawasan Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu 1. Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah 2. Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

AHMAD LUTHFI

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum ,



Haerudin, S.H., M.H.
Pembina Utama Muda
NIP. 197007291996031001